



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**TAHUN 2014
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

**Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta
Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415
Email : pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id
Website : www.pt-yogyakarta.go.id**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu kinerja selama Tahun 2014.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Tahun 2014, mempunyai 3 (tiga) program yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berusaha secara maksimal agar ketiga program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 telah kami susun, yang tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan untuk disampaikan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Agung RI. Kiranya atas kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut, kami mohon saran dan kritik yang membangun demi kemajuan bersama. Semoga dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini akan memacu kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Ketua,

HARYANTO, SH.MH
NIP. 19530419 198103 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	1
D. Sistematika Penyajian	2
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	4
A. Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014	4
1. Visi dan Misi	4
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	4
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	5
B. Rencana Kinerja Tahun 2014	5
C. Penetapan Kinerja Tahun 2014	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Pengukuran Kinerja	10
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	13
C. Realisasi Anggaran.....	45
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46
BAB V LAMPIRAN	47
1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta	
2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta	
3. Rencana Kinerja Tahun 2014	
4. Penetapan Kinerja Tahun 2014	
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2014	
6. Matriks Rencana Strategis Review 2010 – 2014	

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2014 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2014 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban instansi yang melaporkan "Pencapaian Kinerja" selama Tahun 2014 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pencapaian target kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara keseluruhan pada tahun 2014 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target. Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Tahun 2014 mempunyai 3 (tiga) program yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari masing-masing indikator diilustrasikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100%
		c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %	0%
		d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %	0%
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %	87%
		f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %	96%
		g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %	100%

		h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %	95%
		i. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%
		j. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%
		k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%
		l. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100%
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100%
		c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100%
		d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100%

		e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100%
		f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
		g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
		h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %	100 %
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	0 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %	100 %
		c. Persentase kelulusan eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding	100 %	0 %

		d. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100 %	0%
6.	Peningkatan sarana dan prasana pendukung	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %	0 %
		b. Persentase penghapusan Barang Milik Negara yang diselesaikan	100 %	100%

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dalam rangka mewujudkan manajemen akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai acuan untuk penilaian Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran sebagai sumber data dalam penyusunan LAKIP ini, sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tertuang dalam indikator kinerja utama dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja utama tersebut sebagai pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Tugas pokok tersebut direalisasikan ke pencapaian kinerja yang dibuat dalam bentuk laporan ini, bersamaan dengan berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan dari program-program yang telah direncanakan di awal tahun dan merupakan wujud pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengimplementasikan program dan kegiatannya. Pertanggungjawaban program dan kegiatan tersebut dilaksanakan selama satu tahun anggaran dan sebagai evaluasi untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun-tahun yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

1. Kedudukan

Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan instansi vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif, Mahkamah Agung RI, yang berkedudukan di ibukota propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Banding. Pengadilan Tinggi Yogyakarta membawahi 5 Lingkungan Pengadilan Negeri yaitu :

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Pengadilan Negeri Sleman
3. Pengadilan Negeri Bantul
4. Pengadilan Negeri Wates
5. Pengadilan Negeri Wonosari

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Banding, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi. Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertanggungjawabkan kinerja kepada Mahkamah Agung RI serta publik. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam

melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri dapat terakomodir.

2. Tugas

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus dan mengadili Perkara Pidana dan Perkara Perdata di tingkat banding serta mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.

3. Fungsi

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya, menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

C. ORGANISASI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dibantu oleh Wakil Ketua, Para Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, dan Para Panitera Muda, yang mana para pejabat tersebut bersifat teknis yang dilaksanakan dibagian kepaniteraan. Tugas yang bersifat administrasi umum dilaksanakan oleh bagian kesekretariatan, yakni Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris, Ka Sub Bagian Umum, Ka Sub Bagian Kepegawaian, Ka Sub Bagian Keuangan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Yogyakarta disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- C. Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- D. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
 - 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
- B. Rencana Kinerja Tahun 2014
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
- C. Realisasi Anggaran Tahun 2014

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran – saran

BAB V LAMPIRAN

- 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- 2. Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- 3. Rencana Kinerja Tahun 2014
- 4. Penetapan Kinerja Tahun 2014
- 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2014
- 6. Matriks Rencana Strategis Review 2010 – 2014

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, yang dapat dijabarkan menjadi :

VISI :

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Pengadilan Tinggi yang merupakan peradilan di bawah Mahkamah Agung, visi Pengadilan Tinggi selaras dengan visi Mahkamah Agung yaitu:

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung "

MISI :

Untuk mewujudkan visi tersebut perlu ditetapkan misi Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pengadilan Tinggi mempunyai 2 (dua) tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel.

Sasaran dari tujuan di atas yaitu :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Peningkatan kualitas pengawasan
4. Meningkatnya Kualitas SDM
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung

- b. Peningkatan pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Sasaran dari tujuan di atas yaitu :

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program Utama

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sesuai visi dan misi yang telah ditentukan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai Program Utama Tahun 2010-2014 sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- c. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Kegiatan Pokok

Program tersebut di atas dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok selama Tahun 2010-2014 yaitu :

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara .
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
- d. Meningkatnya kualitas pengawasan.
- e. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
- f. Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana pendukung

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Rencana Kinerja Tahun 2014 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %
		h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %

		i. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		j. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		l. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %

3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %
		c. Persentase kelulusan eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding	100 %
		d. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100 %
6.	Peningkatan sarana dan prasana pendukung	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %
		b. Persentase penghapusan Barang Milik Negara yang diselesaikan	100 %

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan Kinerja Tahun 2014 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %

		f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %
		h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		i. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		j. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		l. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %

		h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %
		c. Persentase kelulusan eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding	100 %
		d. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100 %
6.	Peningkatan sarana dan prasana pendukung	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %
		b. Persentase penghapusan Barang Milik Negara yang diselesaikan	100 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100%
		c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %	0%
		d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %	0%
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %	87%
		f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %	96%
		g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %	100%
		h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %	95%
		i. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%
		j. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%

		k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%
		l. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100%
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100%
		c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100%
		d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100%
		e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100%
		f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
		g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %

		h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %	100 %
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	0 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %	100 %
		c. Persentase kelulusan eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding	100 %	0 %
		d. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100 %	0%
6.	Peningkatan sarana dan prasana pendukung	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %	0 %
		b. Persentase penghapusan Barang Milik Negara yang diselesaikan	100 %	100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada akhir Tahun 2014 telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dapat dilihat dari sasaran dan target yang telah ditentukan dengan capaian hasilnya yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 12 (dua belas) indikator, yaitu Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan, Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan, Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan, Persentase perkara perdata yang diselesaikan, Persentase perkara pidana yang diselesaikan, Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan, Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan, Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

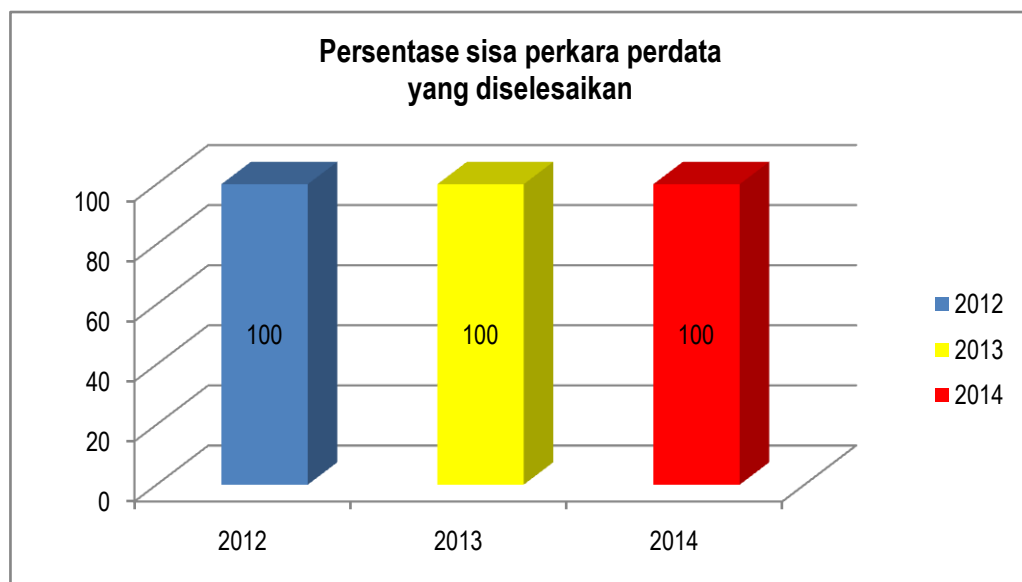
Indikator Kinerja	Target 2014 %	Realisasi 2014 %	Realisasi 2013 %	Realisasi 2012 %
a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	100	100	100
b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100	100	100	100
c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan	100	0	-	-
d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100	0	0	-
e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100	87	80	77
f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100	96	93	90
g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	100	100	-	-

h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100	95	100	-
i. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100	100	100	100
j. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100	100	100	100
k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100	100	-	-
l. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100	100	100	100

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut :

a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Persentase %
2012	33	33	100
2013	22	22	100
2014	27	27	100



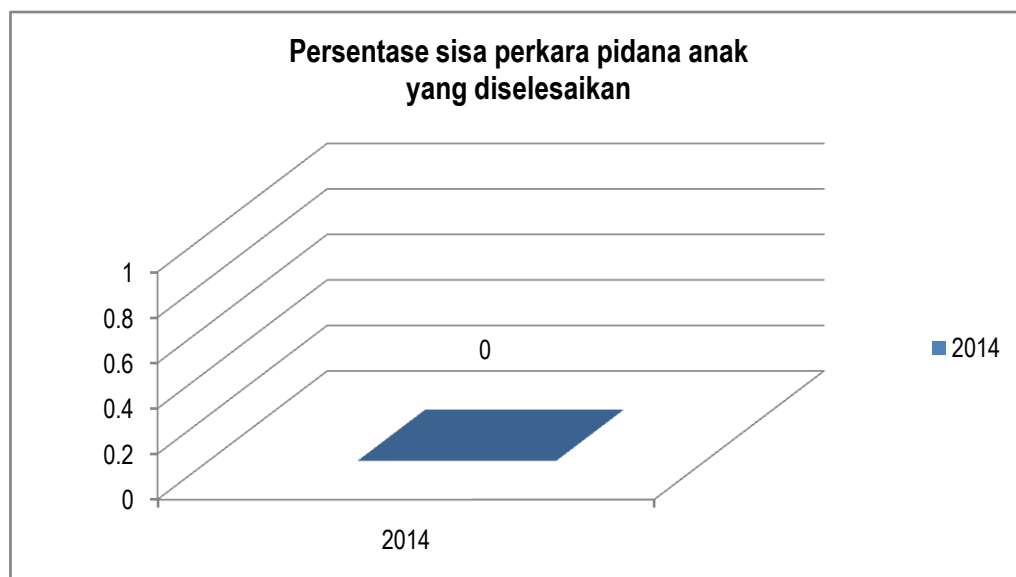
b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Persentase %
2012	9	9	100
2013	10	10	100
2014	10	10	100



c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan

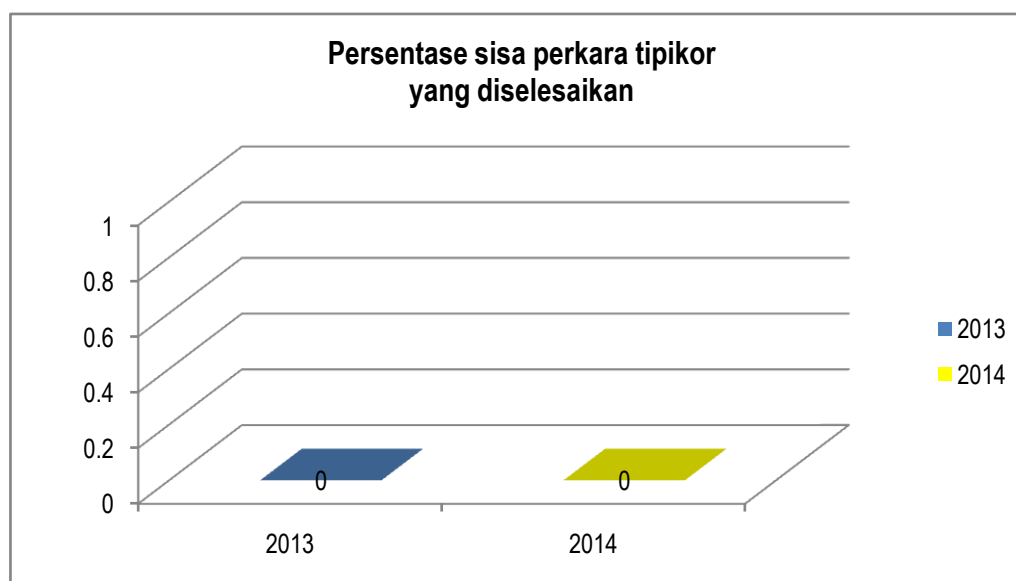
Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Persentase %
2014	0	0	0



Keterangan : Pengukuran perkara pidana anak dilakukan terpisah pada tahun 2014 seiring pemberlakuan pemisahan register peradilan anak (berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Peradilan Umum tertanggal 18 Juli 2014 Nomor 251/DJU/PL 03/07/2014 perihal Pemberitahuan Register Peradilan Pidana Anak). Pencapaian pada sasaran ini sebesar 0 % dikarenakan tidak ada sisa perkara pidana anak pada tahun sebelumnya sehingga tidak ada sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2014.

d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Persentase %
2013	0	0	0%
2014	0	0	0%

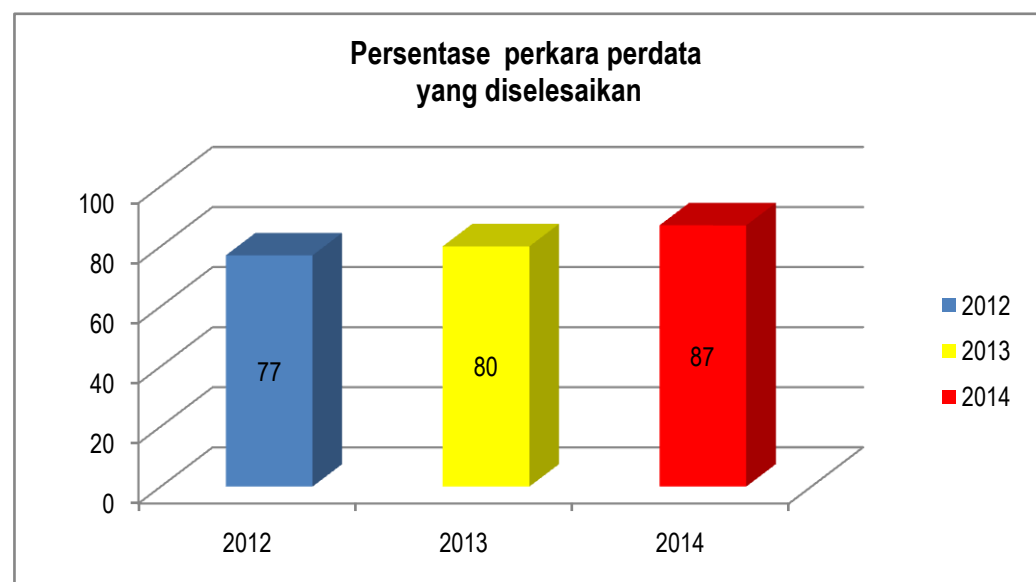


Keterangan :

Pencapaian pada sasaran ini sebesar 0 % dikarenakan tidak ada sisa perkara tindak pidana korupsi pada tahun sebelumnya sehingga tidak ada sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2014.

e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Akhir Tahun	Persentase %
2012	33	97	108	22	77
2013	22	118	113	27	80
2014	27	84	97	14	87



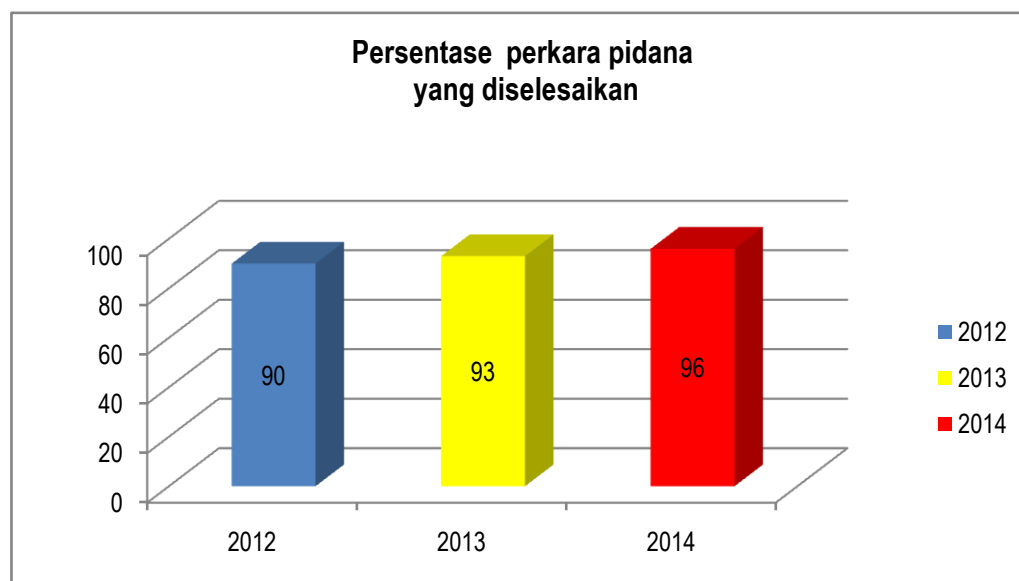
Keterangan :

Penyelesaian perkara perdata belum dapat mencapai 100% dikarenakan banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2014 maka perkara tersebut akan menjadi sisa perkara dalam akhir bulan atau akhir tahun. Sisa perkara tersebut akan selesai di awal tahun berikutnya.

f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Putus Sela	Cabut	Sisa Akhir Tahun	Persentase %
2012	9	123	120	2	-	10	90
2013	10	142	142	-	-	10	93

2014	10	139	143	-	-	6	96
------	----	-----	-----	---	---	---	----

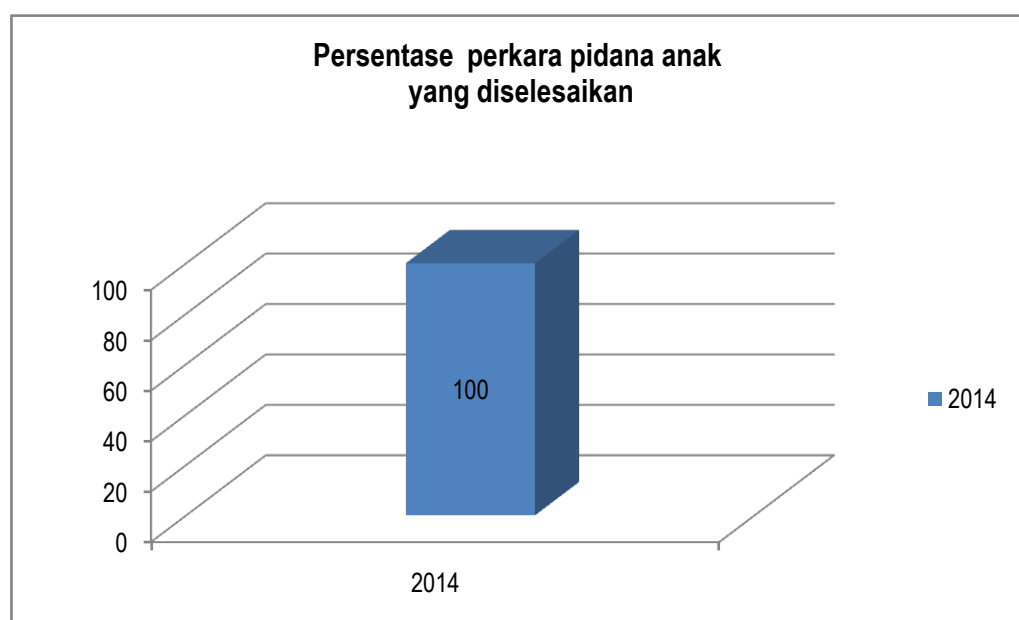


Keterangan :

Penyelesaian perkara pidana belum dapat mencapai 100% dikarenakan banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2014 maka perkara tersebut akan menjadi sisa perkara dalam akhir bulan atau akhir tahun. Sisa perkara tersebut akan selesaikan di awal tahun berikutnya.

g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan

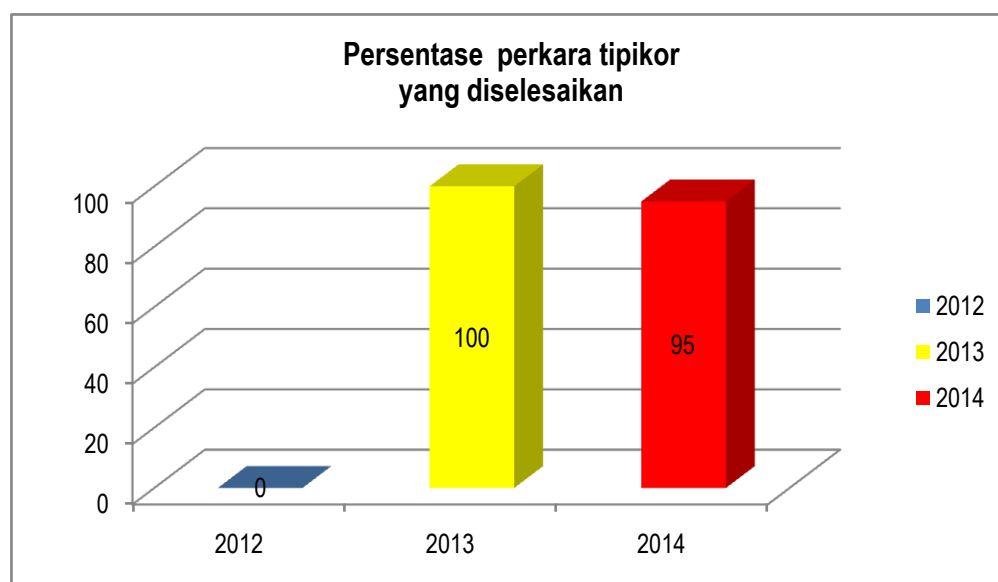
Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Akhir Tahun	Persentase %
2014	0	2	2	0	100



Keterangan : Pengukuran perkara pidana anak dilakukan terpisah pada tahun 2014 seiring pemberlakuan pemisahan register peradilan anak (berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Peradilan Umum tertanggal 18 Juli 2014 Nomor 251/DJU/PL 03/07/2014 perihal Pemberitahuan Register Peradilan Pidana Anak).

h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Akhir Tahun	Persentase %
2013	0	38	38	0	100
2014	0	19	18	1	95

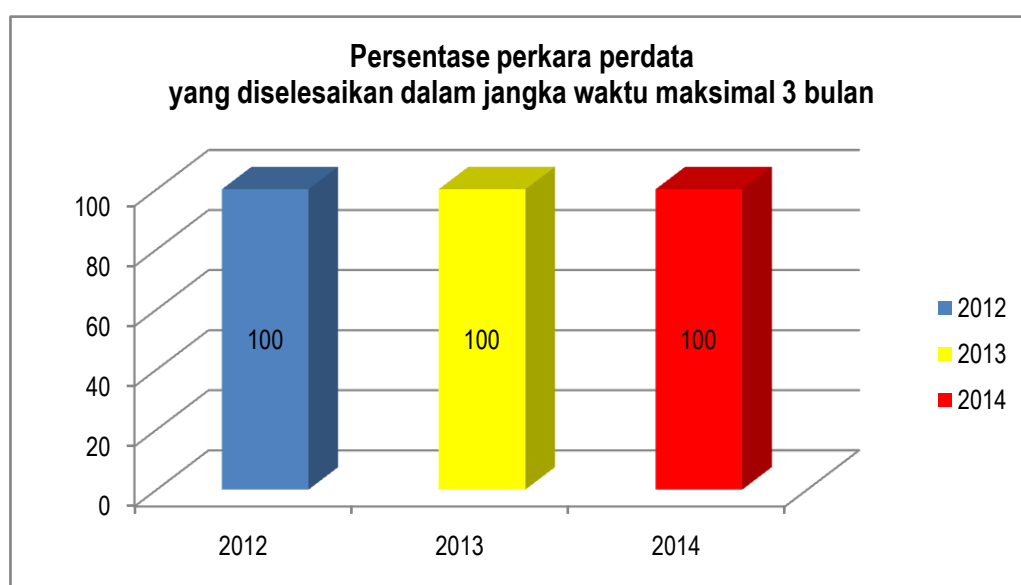


Keterangan :

Pengukuran penyelesaian perkara tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan secara terpisah pada tahun 2013 seiring dengan terbentuknya Kepaniteraan Tipikor pada tahun tersebut. Pencapaian pada tahun 2014 tidak mencapai 100% dikarenakan adanya 1 perkara yang masuk pada akhir Desember 2014 dan menjadi sisa perkara pada akhir bulan atau akhir tahun. Penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2014.

i. **Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan**

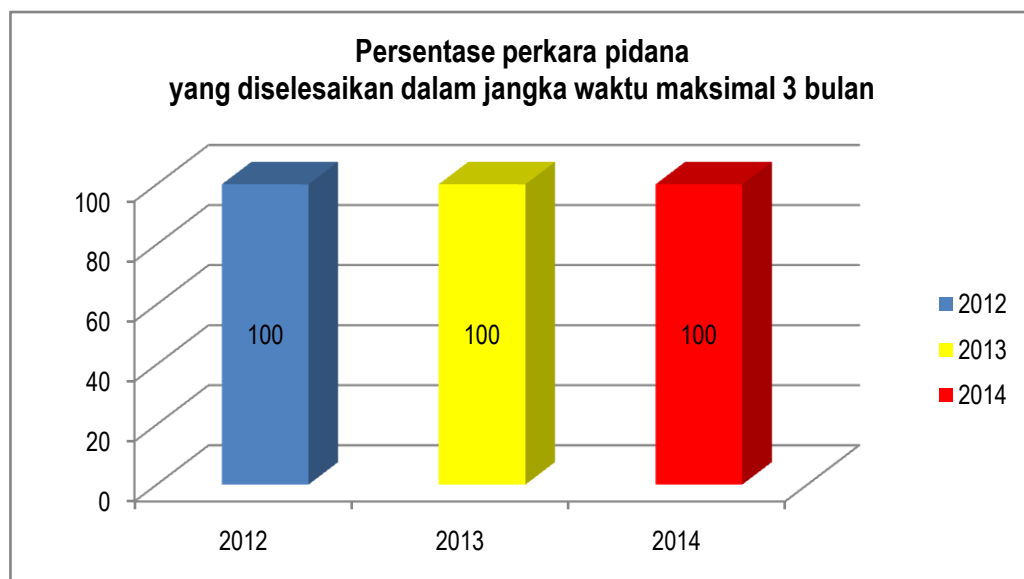
Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Persentase %
2012	33	97	108	108	100
2013	22	118	113	113	100
2014	27	84	97	97	100



Keterangan : Jangka waktu penyelesaian perkara berubah menjadi 3 bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

j. **Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan**

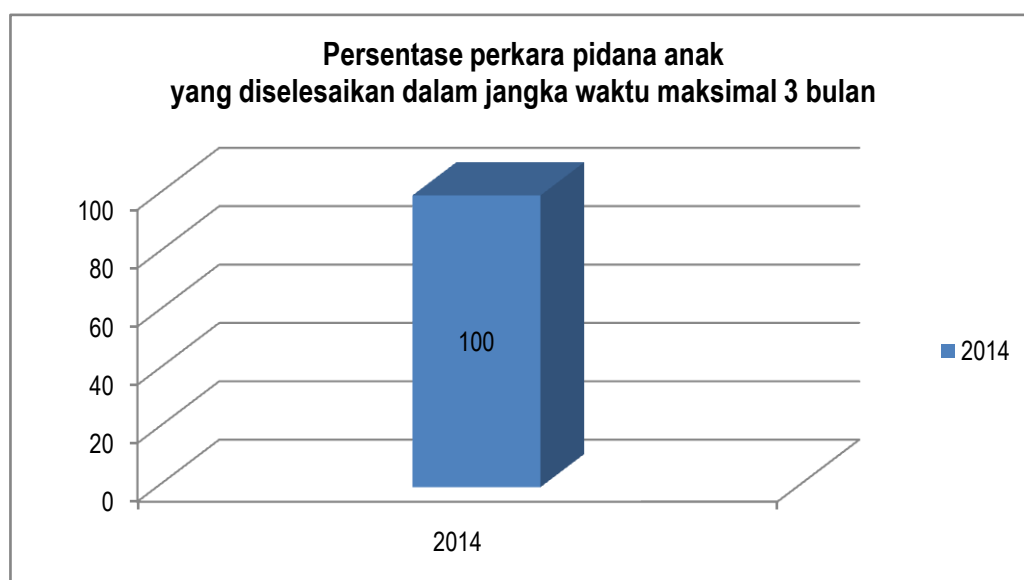
Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Putus Sela	Cabut	Diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Persentase %
2012	9	123	120	2	-	120	100
2013	10	142	142	-	-	142	100
2014	10	139	143	-	-	143	100



Keterangan : Jangka waktu penyelesaian perkara berubah menjadi 3 bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

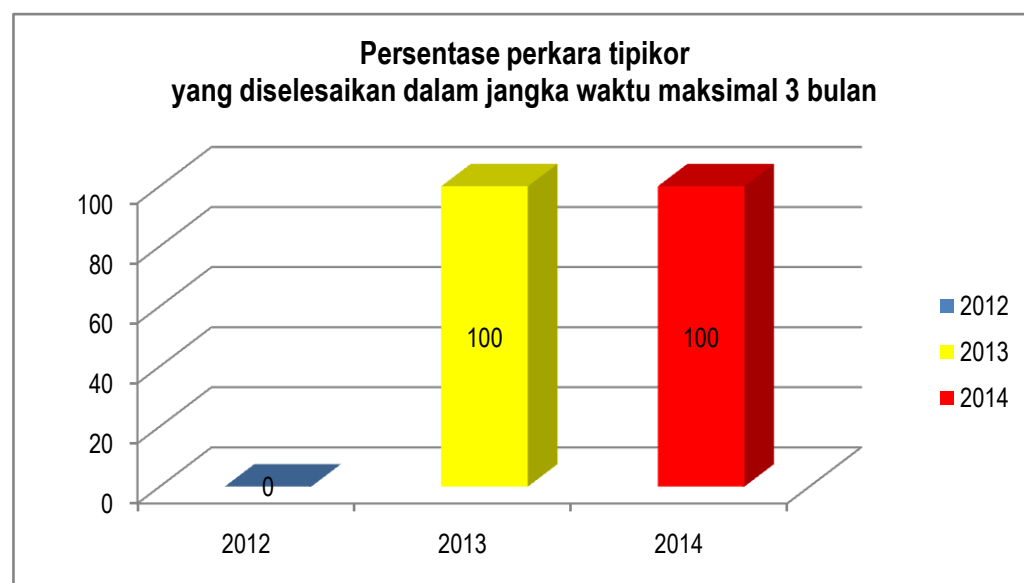
Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Persentase %
2014	0	2	2	2	100



- Keterangan : 1. Jangka waktu penyelesaian perkara berubah menjadi 3 bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
2. Pengukuran perkara pidana anak dilakukan terpisah pada tahun 2014 seiring pemberlakuan pemisahan register peradilan anak (berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Peradilan Umum tertanggal 18 Juli 2014 Nomor 251/DJU/PL 03/07/2014 perihal Pemberitahuan Register Peradilan Pidana Anak).

I. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Persentase %
2013	0	38	38	38	100
2014	0	19	18	18	100



Keterangan :

Kepaniteraan Tipikor baru terbentuk pada tahun 2013.

2. Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi perkara baik pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 8 (delapan) indikator yaitu Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis, Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis, Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis, Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

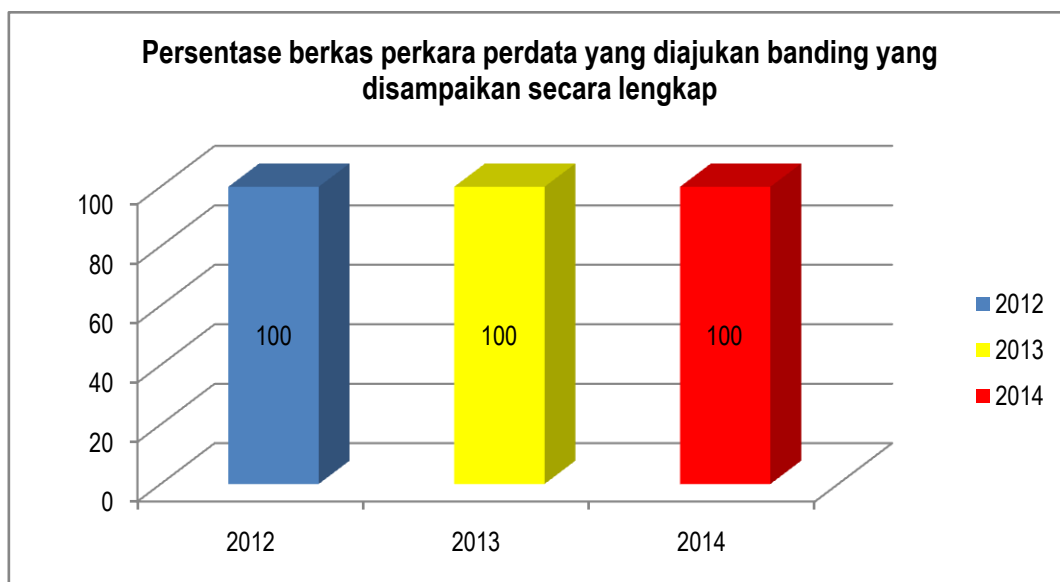
Indikator Kinerja	Target 2014 %	Realisasi 2014 %	Realisasi 2013 %	Realisasi 2012 %
a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100	100	100	100
b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100	100	100	100
c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100	100	-	-
d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100	100	100	100

e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100	100	100	100
f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100	100	100	100
g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100	100	-	-
h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100	100	100	100

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :

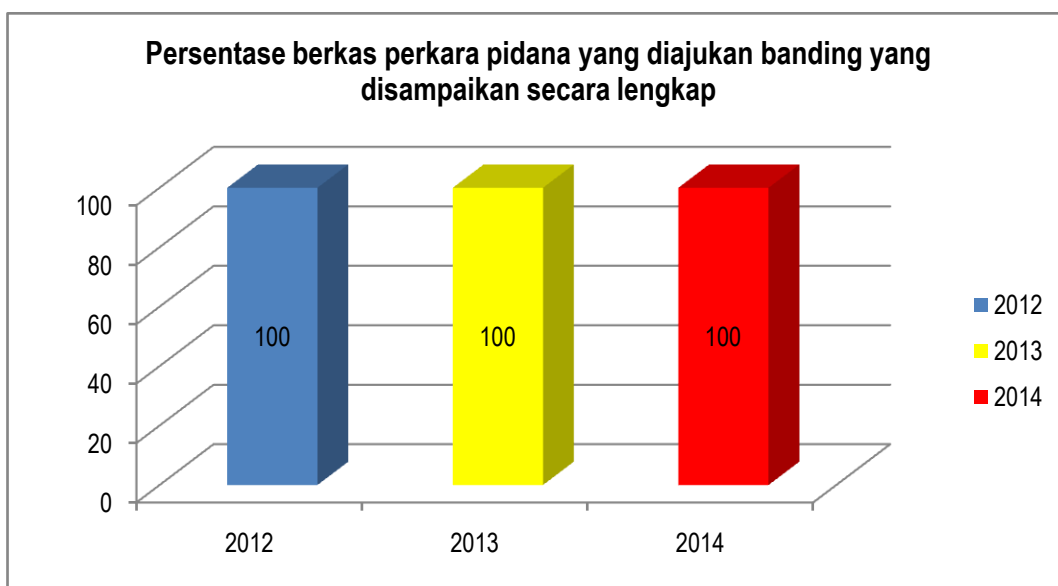
a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Tahun	Masuk	Dinyatakan lengkap	Persentase %
2012	97	97	100
2013	118	118	100
2014	84	84	100



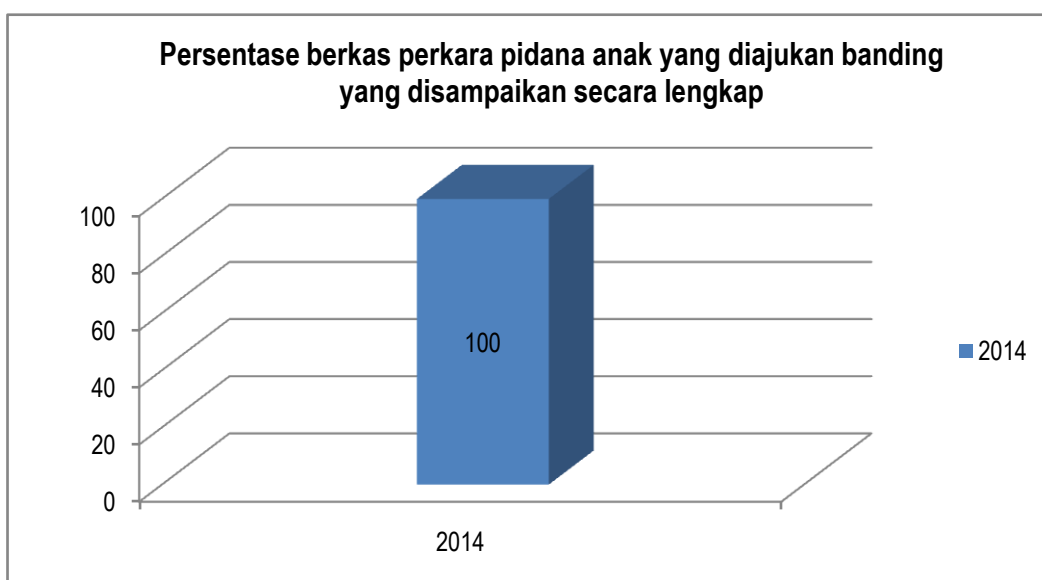
b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Tahun	Masuk	Dinyatakan lengkap	Persentase %
2012	123	123	100
2013	142	142	100
2014	139	139	100



c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

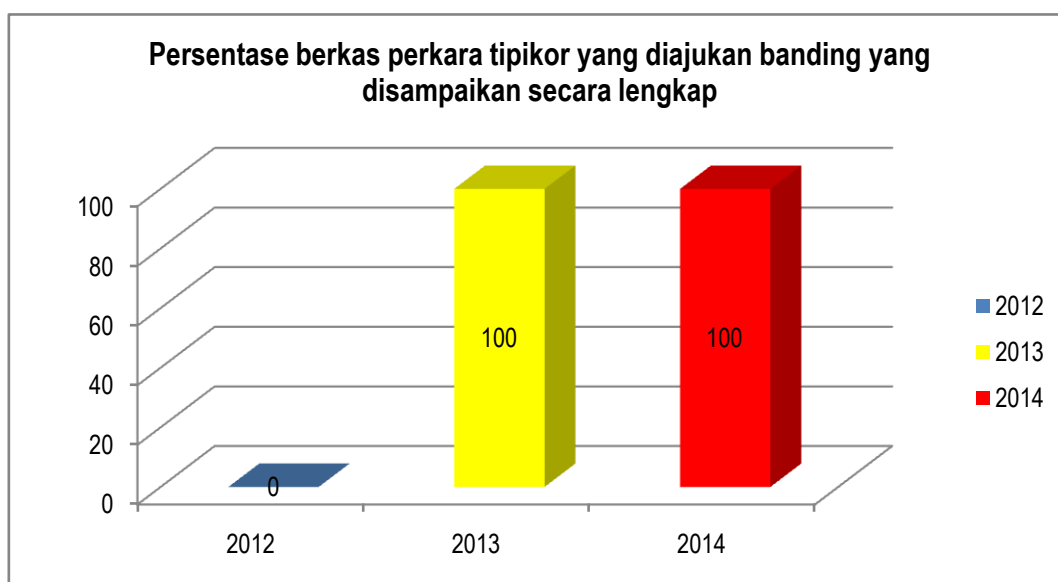
Tahun	Masuk	Dinyatakan lengkap	Persentase %
2014	2	2	100



Keterangan : Pengukuran perkara pidana anak dilakukan terpisah pada tahun 2014 seiring pemberlakuan pemisahan register peradilan anak (berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Peradilan Umum tertanggal 18 Juli 2014 Nomor 251/DJU/PL 03/07/2014 perihal Pemberitahuan Register Peradilan Pidana Anak).

d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Tahun	Masuk	Dinyatakan lengkap	Persentase %
2013	38	38	100
2014	19	19	100

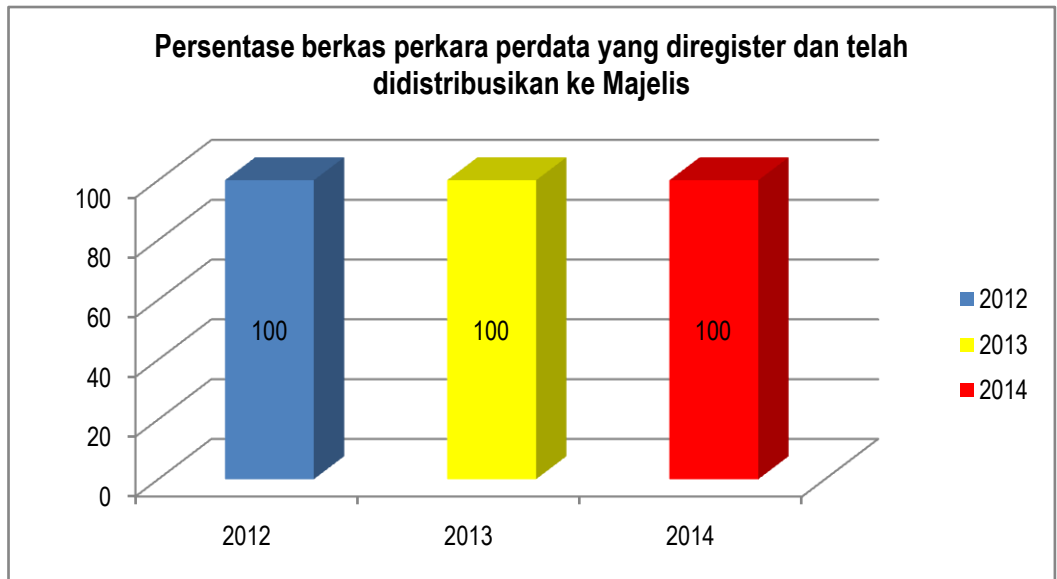


Keterangan :

Kepaniteraan Tipikor baru terbentuk pada tahun 2013.

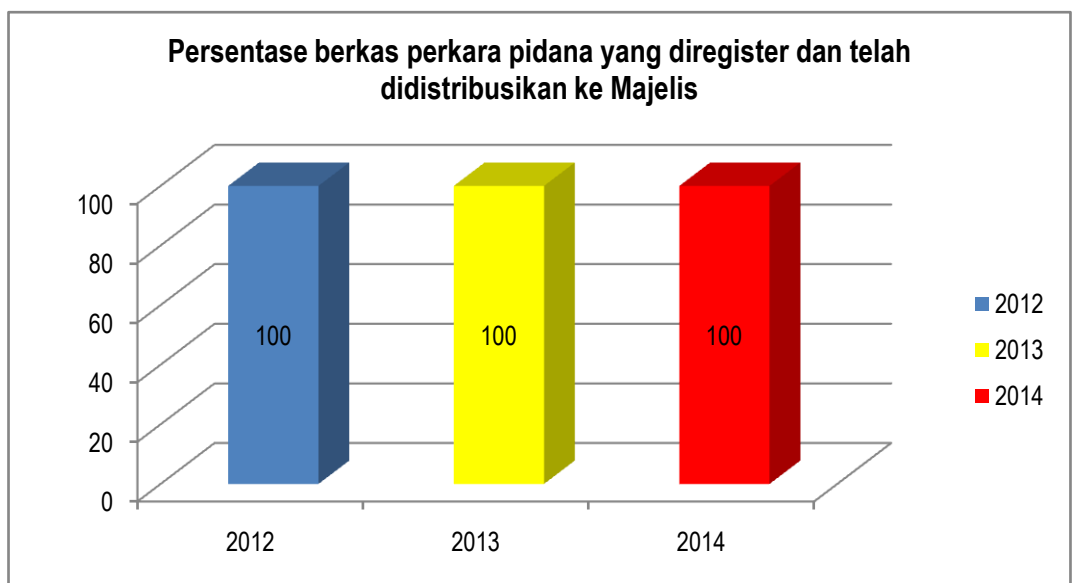
e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.

Tahun	Masuk	Di register dan didistribusikan ke Majelis	Persentase %
2012	97	97	100
2013	118	118	100
2014	84	84	100



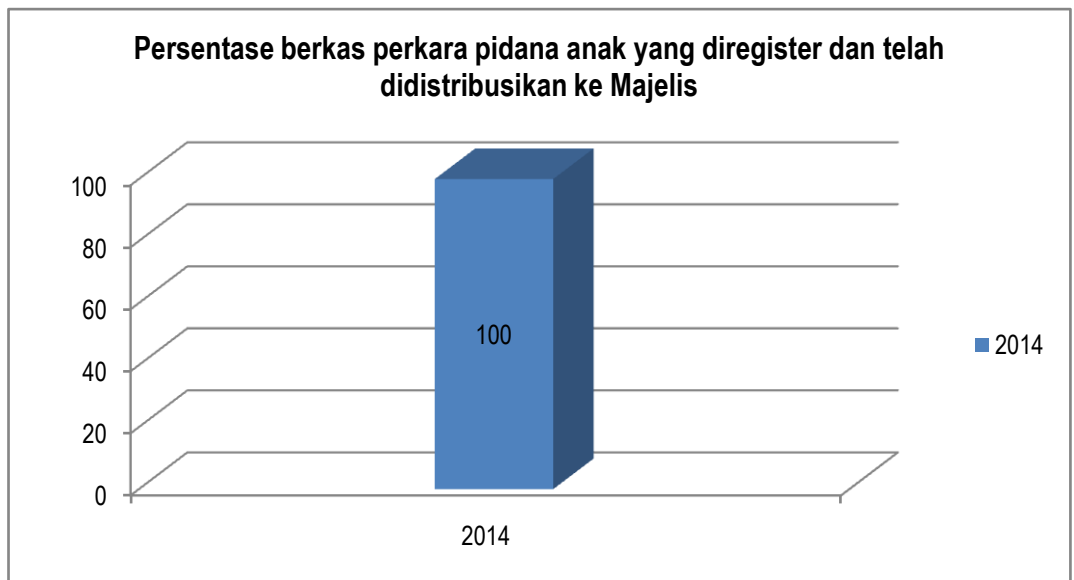
f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.

Tahun	Masuk	Di register dan didistribusikan ke Majelis	Persentase %
2012	123	123	100
2013	142	142	100
2014	139	139	100



g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.

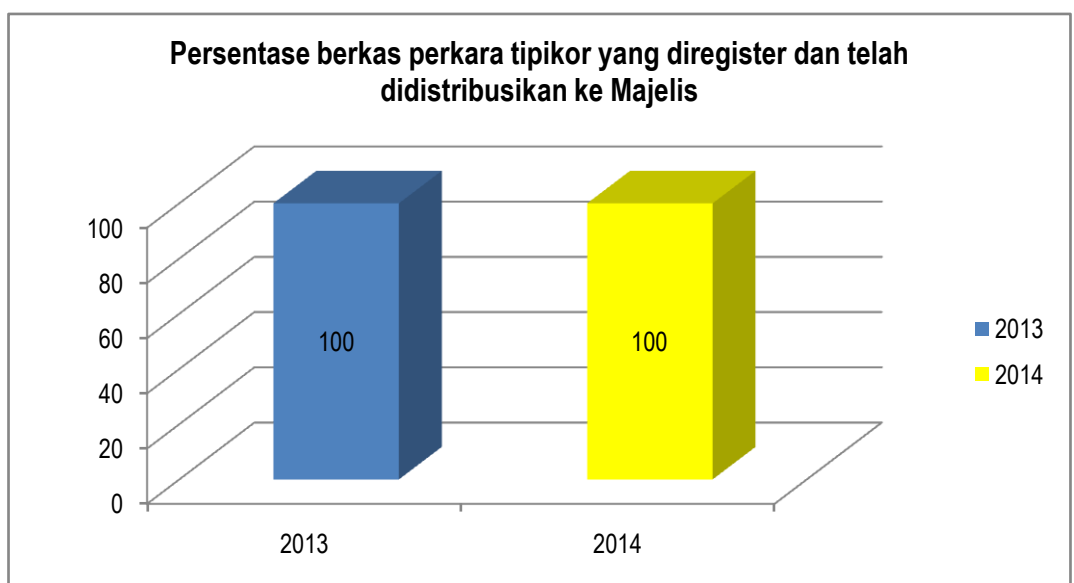
Tahun	Masuk	Di register dan didistribusikan ke Majelis	Persentase %
2014	2	2	100



Keterangan : Pengukuran perkara pidana anak dilakukan terpisah pada tahun 2014 seiring pemberlakuan pemisahan register peradilan anak (berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Peradilan Umum tertanggal 18 Juli 2014 Nomor 251/DJU/PL 03/07/2014 perihal Pemberitahuan Register Peradilan Pidana Anak).

h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.

Tahun	Masuk	Di register dan didistribusikan ke Majelis	Persentase %
2013	38	38	100
2014	19	19	100



Keterangan :

Kepaniteraan Tipikor baru terbentuk pada tahun 2013.

3. Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).

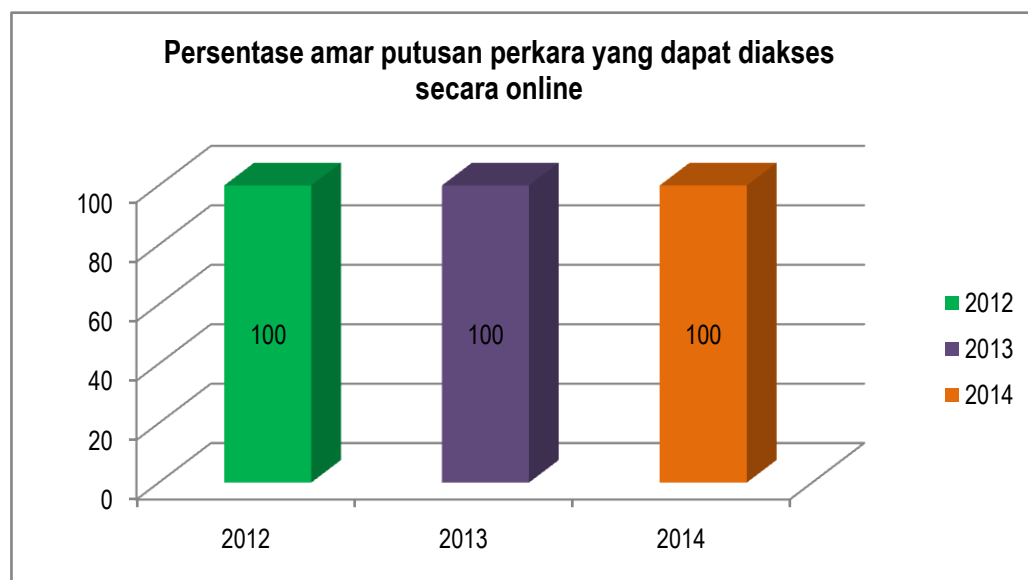
Pengembangan Sistem informasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta terintegrasi dengan fungsi-fungsi lembaga peradilan, dapat diakses melalui ***www.pt-yogyakarta.go.id*** pada menu ***informasi perkara***. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus dan Persentase permohonan informasi yang diselesaikan.

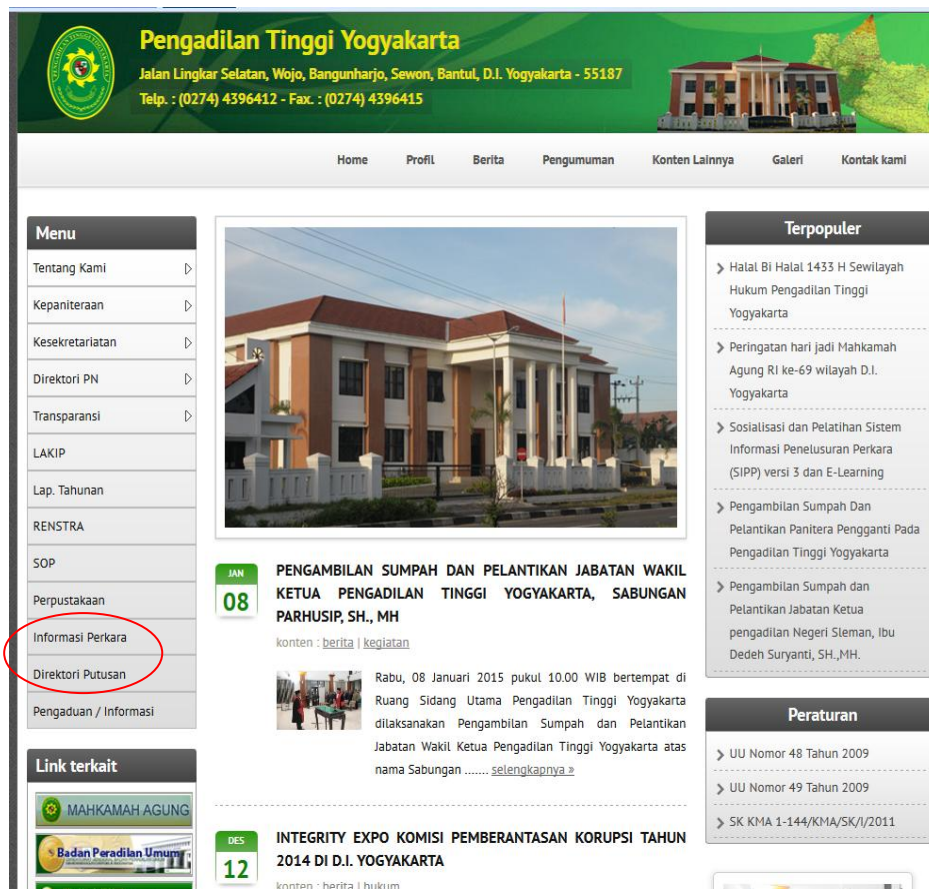
Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2014 %	Realisasi 2014 %	Realisasi 2013 %	Realisasi 2012 %
Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus	100	100	100	100
Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100	100	100	100

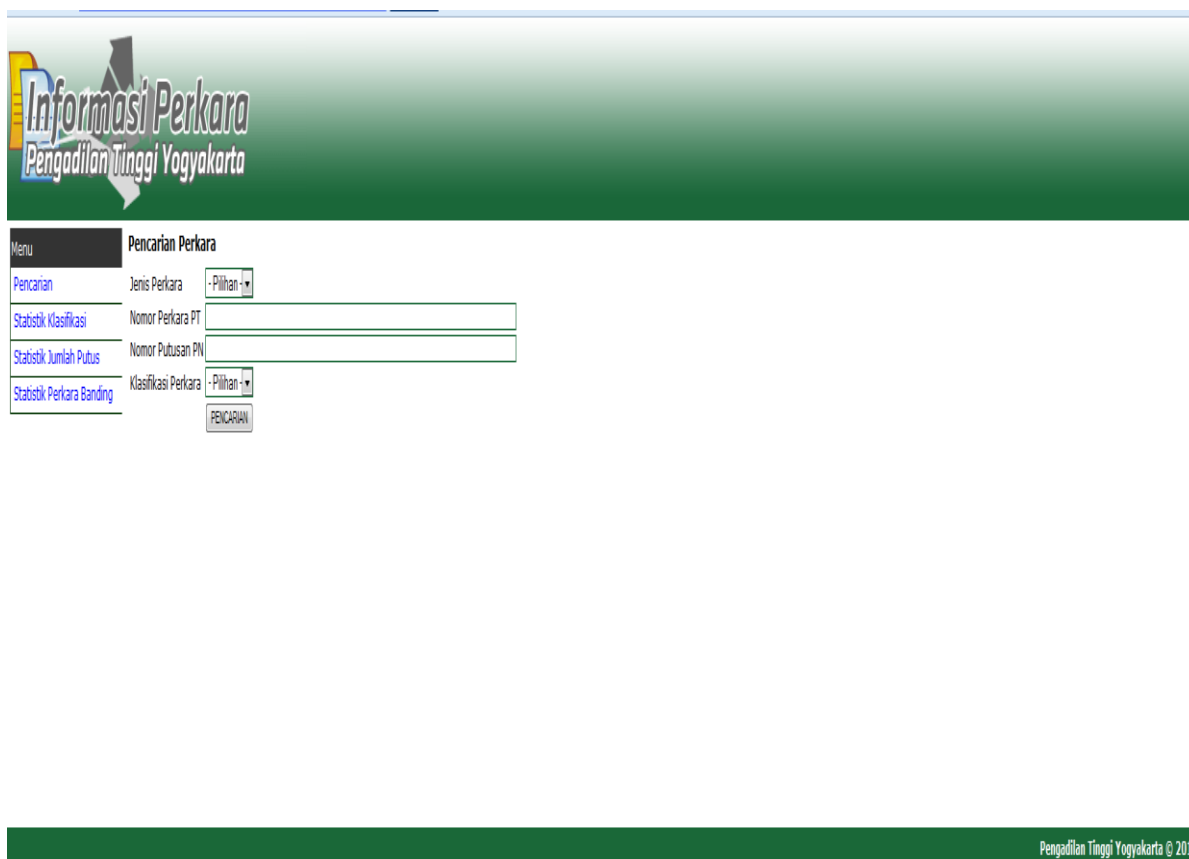
a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus

Amar putusan perkara perdata, pidana, pidana anak serta tipikor Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah dimasukkan dalam Aplikasi Perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Amar putusan tersebut dapat diakses melalui ***www.pt-yogyakarta.go.id*** pada menu ***informasi perkara***.





Gambar 3.1 Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 3.2 Tampilan Aplikasi Informasi Perkara pada Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Informasi Perkara
Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Menu
Pencarian Perkara
Statistik Klasifikasi
Statistik Jumlah Putus
Statistik Perkara Banding

Pencarian Perkara
Jenis Perkara:
Nomor Perkara PT:
Nomor Putusan PN:
Klasifikasi Perkara:

Perkara Pidana

No Perkara PT	No Putusan PN	Klasifikasi Perkara	Status
01/PID.SUS/2013/PT.Tpkor.Yk	04/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk	Tindak Pidana Korupsi	Sudah Putus
15/PID.SUS/2014	254/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Tindak Pidana Narkotika / Psikotropika	Sudah Putus
129/PID.SUS/2014/PT.YK (Narkotika)	254/Pid.Sus/2014/PN.Yyk	Tindak Pidana Narkotika / Psikotropika	Sudah Putus
123/PID.SUS/2014/PT.YK (Narkotika)	231/Pid.Sus/2014/PN.Yyk	Tindak Pidana Narkotika / Psikotropika	Sudah Putus
1 PID_SUS_2015_PT.YK (Narkotika)	384/Pid.Sus/2014/PN.Smm	Tindak Pidana Narkotika / Psikotropika	Belum Putus
135/PID/2014	169/Pid.B/2014/PN.Btl	Kejahatan Kesuisiaan	Sudah Putus
124/PID.SUS/2014/PT.YK (Perindungan Anak)	318/Pid.Sus/2014/PN.Smm	Kejahatan Kesuisiaan	Sudah Putus
121/PID.SUS/2014/PT.YK (Lalu Lintas)	123/Pid.Sus/2014/PN.Btl	UU Lalu Lintas	Sudah Putus
119/PID.SUS/2014/PT.YK (Narkotika)	255/Pid.Sus/2014/PN.Yyk	Tindak Pidana Narkotika / Psikotropika	Sudah Putus
122/PID.SUS/2014/PT.YK (Kehutanan)	105/Pid.Sus/2014/Wno	Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Sudah Putus
99/PID.SUS/2014/PT.YK	140/Pid.Sus/2014/PN.Smm	Tindak Pidana Narkotika / Psikotropika	Sudah Putus
97/PID.SUS/2014/PT.YK	79/Pid.B/2014/PN.Btl (Perindungan Anak)	UU Perindungan Anak	Sudah Putus
96/PID.SUS/2014/PT.YK	196/Pid.Sus/2014/PN.Smm	UU Lalu Lintas	Sudah Putus
95/PID.SUS/2014/PT.YK	150/Pid.Sus/2014/PN.Yyk	Tindak Pidana Narkotika / Psikotropika	Sudah Putus
94/PID/2014/PT.YK	59/Pid.B/2014/PN.Wat	Kejahatan Kesuisiaan	Sudah Putus
93/PID.SUS/2014/PT.YK	39/Pid.Sus/2014/PN.Btl	UU Lalu Lintas	Sudah Putus
92/PID.SUS/2014/PT.YK	155/Pid.Sus/2014/PN.Smm	Tindak Pidana Narkotika / Psikotropika	Sudah Putus
91/PID.SUS/2014/PT.YK	96/Pid.B/2014/PN.Btl	UU Lalu Lintas	Sudah Putus
90/PID/2014/PT.YK	95/Pid.B/2014/PN.Btl	Penggelapan	Sudah Putus
89/PID/2014/PT.YK	167/Pid.B/2014/PN.Smm	Penggelapan	Sudah Putus

Gambar 3.3 Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Pidana dan Tipikor

Informasi Perkara
Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Menu
Pencarian Perkara
Statistik Klasifikasi
Statistik Jumlah Putus
Statistik Perkara Banding

Pencarian Perkara
Jenis Perkara:
Nomor Perkara PT:
Nomor Putusan PN:
Klasifikasi Perkara:

Perkara Perdata

No Perkara PT	No Putusan PN	Klasifikasi Perkara	Status
6/PDT/2015/PT.YK	14/Pdt.G/2014/PN.Wno.	Perceraian dan Hak Asuh Anak	Belum Putus
5/PDT/2015/PT.YK	13/Pdt.G/2014/PN.Yk..	Perbuatan Melawan Hukum	Belum Putus
4/PDT/2015/PT.YK	06/Pdt.G/2014/PN.Wt..	Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi	Belum Putus
3/PDT/2015/PT.YK	31/Pdt.G/2014/PN.Smm.	Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi	Belum Putus
2/PDT/2015/PT.YK	95/Pdt.V/2013/PN.Smm.	Perlawanan	Belum Putus
1/PDT/2015/PT.YK	82/Pdt.G/2012/PN.Btl.	Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi	Belum Putus
84/PDT/2014/PT.YK	03/Pdt.G/2014/PN.Btl.	Perbuatan Melawan Hukum	Belum Putus
83/PDT/2014/PT.YK	04/Pdt.G/2014/PN.Btl.	Perceraian	Belum Putus
82/PDT/2014/PT.YK	67/Pdt.G/2014/PN.Btl.	Perbuatan Melawan Hukum	Belum Putus
81/PDT/2014/PT.YK	10/Pdt.G/2014/PN.Yk.	Pembatalan Akta	Belum Putus
80/PDT/2014/PT.YK	75/PDT.G/2013/PN.YK	Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi	Belum Putus
79/PDT/2014/PT.YK	172/Pdt.G/2013/PN.Smm	Jual Beli Tanah	Belum Putus
78/PDT/2014/PT.YK	10/Pdt.G/2014/PN.Smm	Perbuatan Melawan Hukum	Belum Putus
77/PDT/2014/PT.YK	42/Pdt.G/2014/PN.Smm	Perceraian dan Hak Asuh Anak	Belum Putus
76/PDT/2014/PT.YK	63/Pdt.G/2013/PN.Smm	Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi	Belum Putus
75/PDT/2014/PT.YK	91/Pdt.G/2013/PN.BTL	Pengesahan Jual Beli Tanah	Sudah Putus
74/PDT/2014/PT.YK	09/Pdt.G/2014/PN.Wns.	Perbuatan Melawan Hukum	Sudah Putus
73/PDT/2014/PT.YK	149/Pdt.G/2013/PN.Smm	Jual Beli	Belum Putus
72/PDT/2014/PT.YK	158/Pdt.G/2013/PN.Smm	Ganti Rugi	Sudah Putus
71/PDT/2014/PT.YK	138/Pdt.G/2013/PN.Smm	Tanah	Sudah Putus

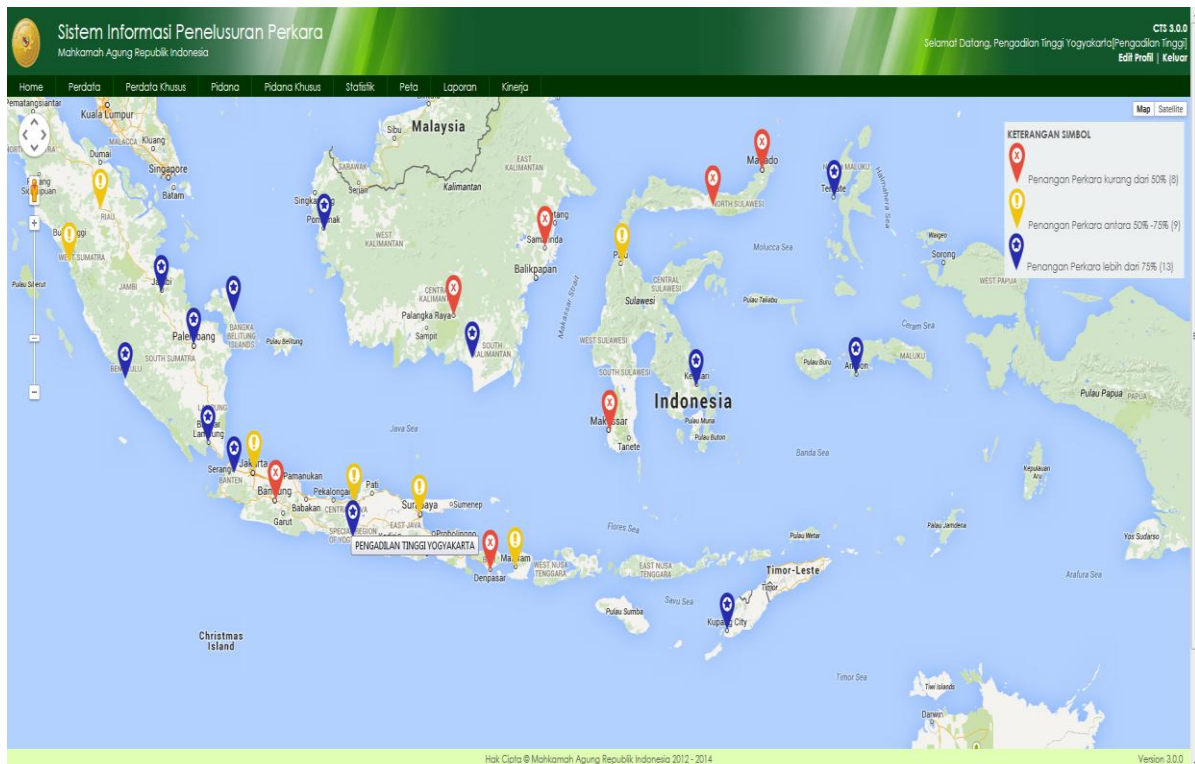
Gambar 3.4 Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Perdata

Selain melalui melalui www.pt-yogyakarta.go.id pada menu informasi perkara, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam rangka keterbukaan informasi juga telah melaksanakan berbagai program yaitu :

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

The screenshot shows the website for PT YOGYAKARTA. The header includes the Mahkamah Agung logo and navigation links: Depan, Petunjuk Penggunaan, Tentang, RSS, Search, and Submit Query. The main content area is titled 'PT YOGYAKARTA' and 'Putusan Terbaru'. It lists several court decisions with details such as the case name, register number, date, and upload time. For example, one entry is 'PT YOGYAKARTA > Pidana Khusus > Narkotika' with register number 2014 and upload date 08-01-2015. The left sidebar shows navigation options like 'Depan', 'Direktori', 'Semua Direktori', 'Pemalsuan Uang (2 putusan)', 'Perdata (187 putusan)', 'Pidana (137 putusan)', 'Pidana Khusus (136 putusan)', and 'Tahun'. The right sidebar has sections for 'Semua Putusan' and 'Putusan Pilihan'.

Gambar 3.5 Tampilan Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 3.6 Tampilan Peta SIPP Versi 3
Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membiru

The screenshot shows the 'DAFTAR PERKARA PERDATA' interface. It includes a search bar with the text 'Ketik kata kunci dan tekan enter', a 'Cari' button, and a 'Pencarian Detil' button. There are also 'Prev', '1', '2', and 'Next' navigation buttons. The table below contains the following data:

No Urut	Asal Pengadilan Negeri	Nama Pemohon	No Perkara	Jenis Perkara	Tgl. Pendaftaran PN	Tgl. Putusan PN	Tgl. Permohonan Banding	Perkasa Berkas
1	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Penggugat: Eka Hari Prasetya	84/PDT.G/2014/PN.YYK	Perceraian	01 Sep 2014	17 Des 2014	30 Des 2014	Teliti
2	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Kuasa Penggugat: J.C.SUDJAMI,SH, DK	36/PDT.G/2014/PN.YYK	Lain-Lain	16 Apr 2014	08 Des 2014	22 Des 2014	Teliti

The footer of the interface includes 'Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012 - 2014' and 'Version 3.0.0'.

Gambar 3.7 Tampilan Peta SIPP Versi 3 Perkara Perdata

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

CTS 3.0.0 (CTS Tingkat Banding)
Selamat Datang, **Super Administrator**, Anda Login Sebagai [Super Administrator]
Edit Profil | Keluar

Home Perdata Pidana Tipikor Laporan Referensi Sistem Pesan

DAFTAR PERKARA PIDANA

Permohonan Banding Register Banding

Ketik kata kunci dan tekan enter! Cari Pencarian Detil Prev 1 Next

No Urut	Asal Pengadilan Negeri	Nama Pemohon	No Perkara	Jenis Perkara	Tgl. Pendaftaran PN	Tgl. Putusan PN	Tgl. Permohonan Banding	Periksa Berkas
1	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	Jaksa Penuntut: RAHAYU DEWI ANDAYANI,SH	403/PID.B/2014/PN Smn	Tanpa hak mengambil atau memiliki suatu barang milik orang lain	22 Okt 2014	12 Jan 2015	19 Jan 2015	Teliti
2	PENGADILAN NEGERI WATES	Kuasa Jaksa Penuntut: F. RINI TYAS UTAMI, S.H	110/Pid.Sus/2014/PN ...	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18 Nop 2014	23 Des 2014	29 Des 2014	Teliti

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012 - 2014 Show desktop

Gambar 3.8 Tampilan Peta SIPP Versi 3 Perkara Pidana

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

CTS 3.0.0 (CTS Tingkat Banding)
Selamat Datang, **Super Administrator**, Anda Login Sebagai [Super Administrator]
Edit Profil | Keluar

Home Perdata Pidana Tipikor Laporan Referensi Sistem Pesan

DAFTAR PERKARA TIPIKOR

Permohonan Banding Register Banding

Ketik kata kunci dan tekan enter! Cari Pencarian Detil Prev 1 2 3 4 Next

No Urut	Asal Pengadilan Negeri	Nama Pemohon	No. Perkara PN	No. Perkara PT	Jenis Perkara	Tgl. Permohonan Banding	Tgl. Register Pengadilan Tinggi
1	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Kuasa Jaksa Penuntut: SUGENG RIYADIN, SH.MH.	16/PID.SUS/TPK/2014 /PN.YYK	19/PID.SUS-TPK/2014/PT YYK	Tindak Pidana Korupsi	24 Nop 2014	18 Des 2014
2	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Jaksa Penuntut: Ririn Dwi Lita Sari	13/PID.SUS/TPK/2014 /PN.YYK	18/PID.SUS-TPK/2014/PT YYK	Tindak Pidana Korupsi	29 Okt 2014	19 Nop 2014

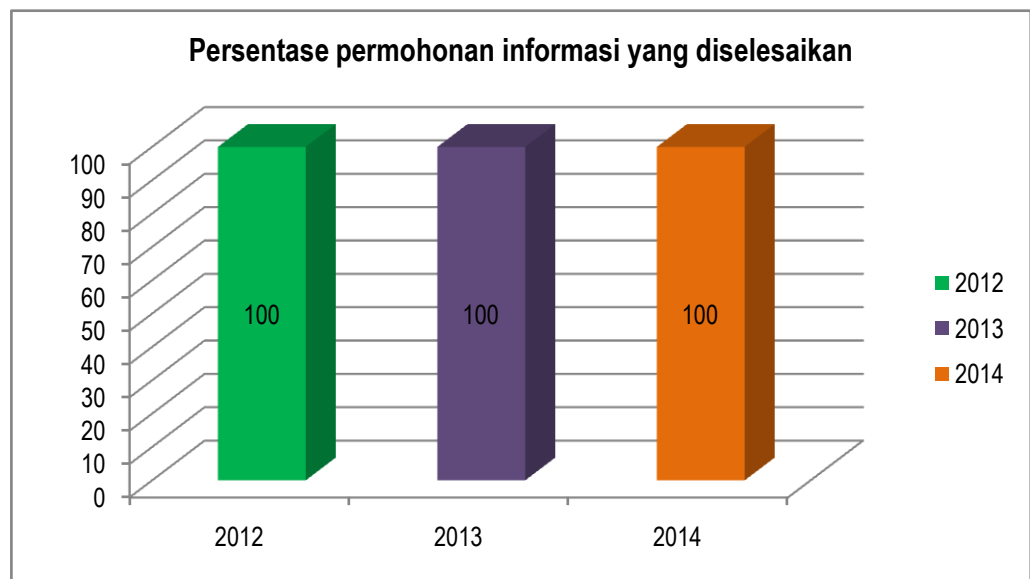
Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012 - 2014 20 Januari 2015 Selasa

Gambar 3.9 Tampilan Peta SIPP Versi 3 Perkara Tipikor

b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan

Pencapaian indikator persentase permohonan informasi yang diselesaikan dapat dilihat dengan membandingkan antara jumlah permohonan informasi yang masuk dengan jumlah permohonan informasi yang diselesaikan. Pencapaian tersebut dapat diuraikan dengan tabel sebagai berikut :

	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Jumlah permohonan informasi yang masuk	16	1	3
Jumlah permohonan informasi yang diselesaikan	16	1	3
Persentase	100%	100%	100%



Gambar 3.10 Desk Information Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 3.11 Touch screen informasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

4. Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan

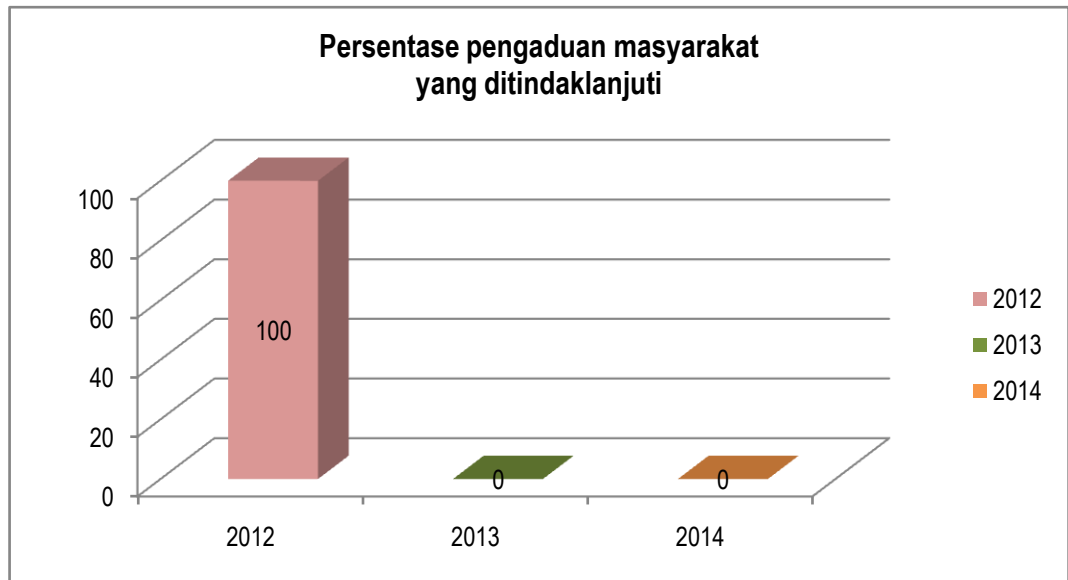
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2014 %	Realisasi 2014 %	Realisasi 2013 %	Realisasi 2012 %
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	0	0	100
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti



Keterangan :

Pengaduan yang masuk pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta selalu mendapatkan perhatian. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan berbagai jenis penanganannya :

1. Tahun 2012

Pengaduan ada : 1

- 1 ditindak lanjuti

2. Tahun 2013

Pengaduan nihil.

Pencapaian persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 sebesar 0% dikarenakan pengaduan masyarakat pada tahun 2013 nihil (tidak ada pengaduan masuk).

3. Tahun 2014

Pengaduan nihil.

Pencapaian persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 sebesar 0% dikarenakan pengaduan masyarakat pada tahun 2014 nihil (tidak ada pengaduan masuk).

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti



Pencapaian pada sasaran ini dapat mencapai 100% karena semua temuan hasil pemeriksaan baik dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga telah melaksanakan pengawasan daerah dan pengawasan bidang. Pengawasan daerah dilaksanakan 2 kali dalam setahun ke Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Pengawasan bidang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memantau dan mengevaluasi kinerja di setiap bagian sesuai job description masing-masing.

5. Sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Yogyakarta direalisasikan dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator, yaitu persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial, persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial, Persentase kelulusan eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding, dan Persentase Baperjakat yang diselesaikan.

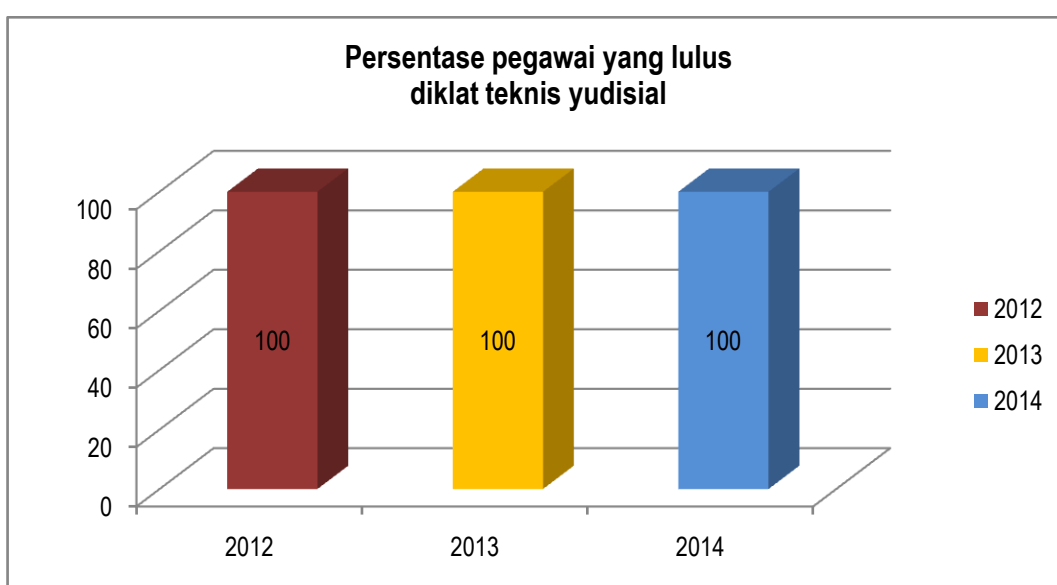
Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2014 %	Realisasi 2014 %	Realisasi 2013 %	Realisasi 2012 %
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100	100	100	100

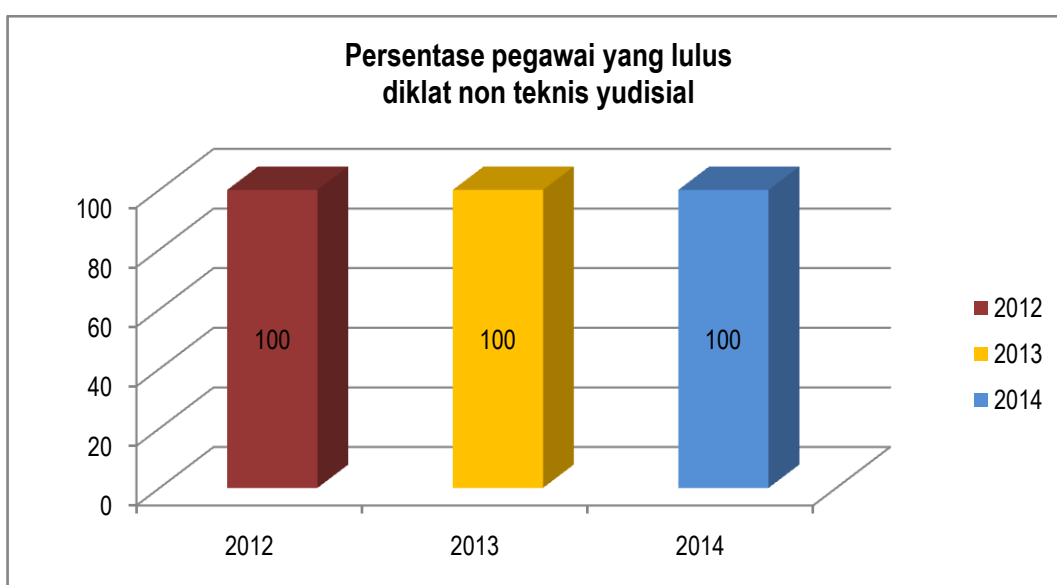
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100	100	100	100
c. Persentase kelulusan eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding	100	0	100	100
d. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100	0	0	100

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial



b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial



Hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengikuti berbagai kegiatan diklat diantaranya sebagai berikut :

DIKLAT YUSTISIAL	DIKLAT NON YUSTISIAL
1. Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Tinggi Pengawasan Seluruh Indonesia (Gelombang I)	1. Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan V Tahun 2014
2. Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XV	2. Diklat Teknologi Informasi Bagi Pengelola Web
3. Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Hakim Peradilan Umum Gelombang I	3. Workshop Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Aplikasi SAIBA Bagi Mitra Kerja KPPN Yogyakarta Angkatan I
4. Diklat Perkara Tindak Pidana Narkoba Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer	4. Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2014
5. Pembekalan Administrasi Peradilan/CTS Bagi Hakim/Panitera Pengadilan Tinggi Tahun Anggaran 2014	5. Diklat Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2014
6. Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Perkara Tindak Pidana Pemilu (Presiden Dan Wakil Presiden) Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	6. Bimbingan Teknis SIMAK BMN Pada Satuan Kerja Di 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Se DIY
7. Kegiatan Sosialisasi Dan Advokasi Pengaduan Masyarakat	7. Diklat Bendahara Angkatan IV Dan V
8. Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilu	

Selain itu kegiatan diklat diatas, pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga telah mengikuti kegiatan lain untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka peningkatan kinerja diantaranya sebagai berikut :

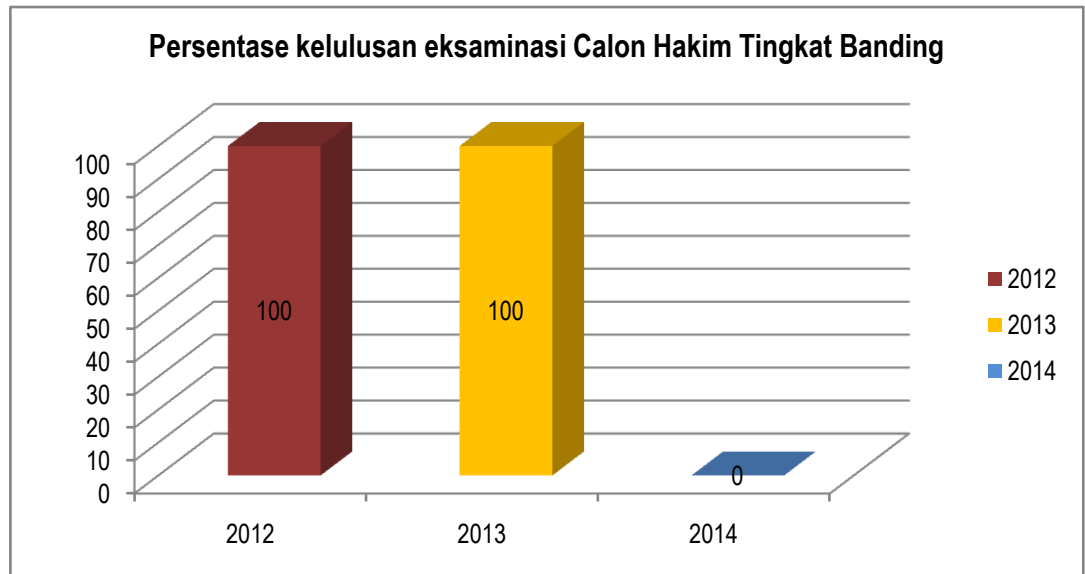
1. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI

2. Diskusi Publik Dengan Dengan Tema Menjawab Keberatan Masyarakat Terhadap Implementasi Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
3. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara
4. Seminar Pengaturan Cybercrimes Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
5. Diskusi Penyusunan Roadmap Pengembangan SIPP
6. Rapat Koordinasi Aparatur Penegakan Hukum “ Perlakuan Dan Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku”
7. Diseminasi Dan Informasi Pedoman Perundang-Undangan Keswa Dan Visum Et Repertum Psychiatricum Bidang Perdata
8. Rapat Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme
9. Diskusi Pelaksanaan Eksekusi : Hambatan Dan Problematikanya
10. Lokakarya Pencegahan HIV/AIDS Dan Ketergantungan Narkoba
11. Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014
12. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Narkotika
13. Kegiatan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan / BMN Tahun Anggaran 2014
14. Kegiatan Sosialisasi Komponen Cadangan Dalam Sishanta PNS, Karyawan, BUMN, BUMD, Swasta Dan TNI/Polri.

c. Persentase kelulusan eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding

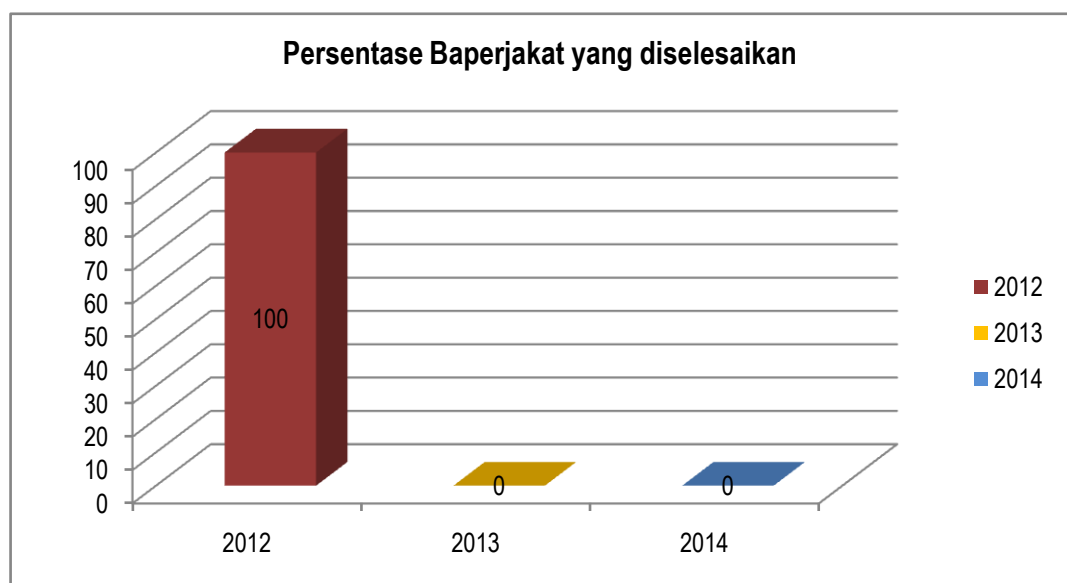
	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Jumlah Calon Hakim Tingkat Banding Yang Mengikuti Eksaminasi	14	20	0
Jumlah Calon Hakim Tingkat Banding Yang Mengikuti yang dinyatakan lulus Eksaminasi	14	20	0
Persentase	100%	100%	0%

Keterangan : Pada tahun 2014 tidak diselenggarakan eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding



d. Persentase Baperjakat yang diselesaikan

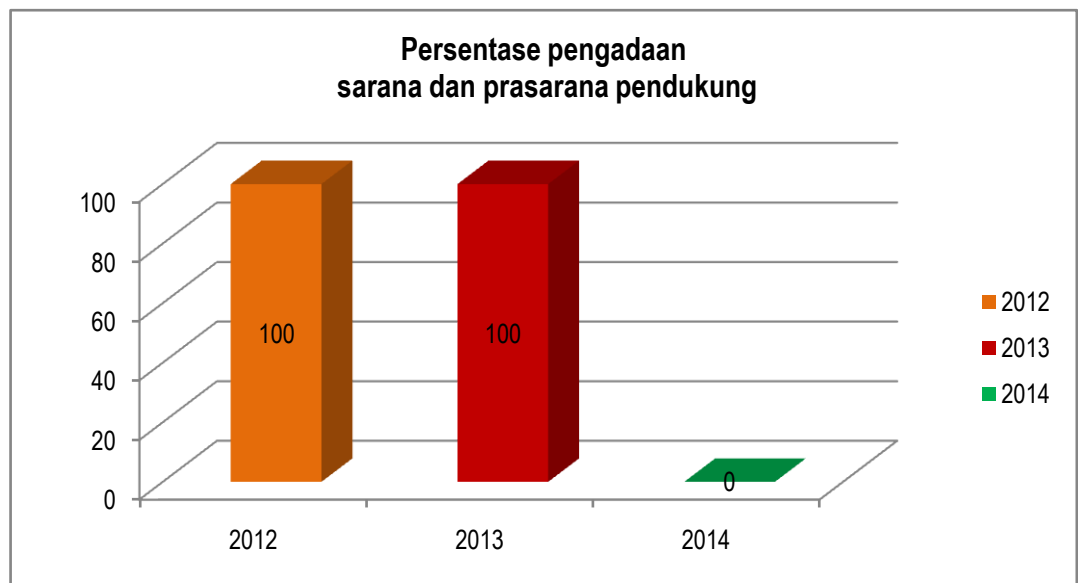
	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Jumlah Baperjakat yang diusulkan	1	0	0
Jumlah Baperjakat yang diselesaikan	1	0	0
Persentase	100%	0%	0%



6. Sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung

Sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung di Pengadilan Tinggi Yogyakarta direalisasikan dengan Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung dan Persentase penghapusan Barang Milik Negara yang diselesaikan.

a. **Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung**



Keterangan :

Pencapaian Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung pada tahun 2014 sebesar 0% dikarenakan tidak adanya anggaran belanja modal pada tahun yang bersangkutan.

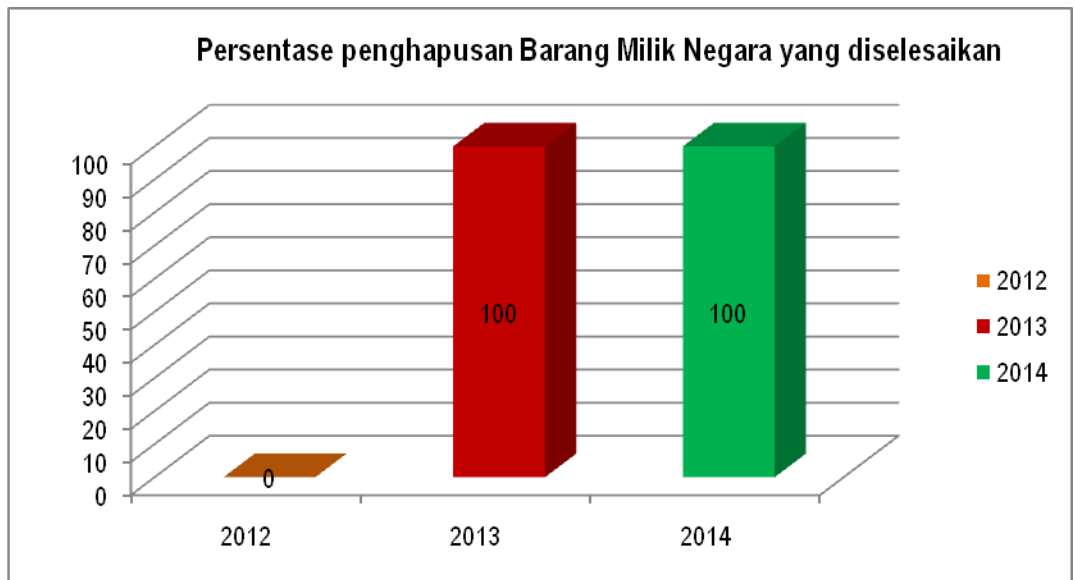
b. **Persentase penghapusan Barang Milik Negara yang diselesaikan**

	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Jumlah penghapusan Barang Milik Negara yang diusulkan	0	4	400
Jumlah penghapusan Barang Milik Negara yang diselesaikan	0	4	400
Persentase	0%	100%	100%

Keterangan :

Tahun 2013 : Penghapusan berupa kendaraan (2 kendaraan roda dua dan 2 kendaraan roda 4)

Tahun 2014 : Penghapusan berupa peralatan dan mesin



C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014

Realisasi penyerapan anggaran DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta sampai dengan bulan Desember Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO	Kode Satker. Program. Keg.	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa dana	
				s.d Desember		s.d Desember	
				Rp.	%	Rp.	%
	005.0400.400342 400343	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	16.199.714.000,00	15.464.250.529,00	95,46	735.463.471,00	4,54
	005.01.0400.400342	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	16.057.914.000,00	15.327.008.979,00	95,45	730.905.021,00	4,55
1	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	16.057.914.000,00	15.327.008.979,00	95,45	730.905.021,00	4,55
	005.01.01.1066	BELANJA PEGAWAI	14.665.033.000,00	14.191.316.362,00	96,77	473.716.638,00	3,23
	005.01.01.1066(002)(A-Z)	BELANJA BARANG OPERASIONAL	1.038.940.000,00	939.713.963,00	90,45	99.226.037,00	9,55
	005.01.01.1066(011-020)	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	353.941.000,00	195.978.654,00	55,37	157.962.346,00	44,63
	005.03.0400.400343	BADAN PERADILAN UMUM	141.800.000,00	137.241.550,00	96,79	4.558.450,00	3,21
1	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	141.800.000,00	137.241.550,00	96,79	4.558.450,00	3,21
	005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	141.800.000,00	137.241.550,00	96,79	4.558.450,00	3,21
	005.03.07.1049(011-020)	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	141.800.000,00	137.241.550,00	96,79	4.558.450,00	3,21

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2014 ini memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama kurun waktu Tahun 2014 yang dituangkan dalam 3 (tiga) program beserta sasaran dan targetnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta, karena laporan ini melaporkan suatu Pencapaian Kinerja selama Tahun 2014 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis.

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2014 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun yang akan datang.

B. SARAN

1. Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2014 diharapkan agar terwujud suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama yang dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif dan akuntabel.
3. Optimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja dan Kelayakan LAKIP dengan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP lebih optimal.

Ketua
Pengadilan Tinggi Yogyakarta

HARYANTO, SH.MH
NIP. 19530419 198103 1 001

Yogyakarta, Februari 2015
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Tinggi Yogyakarta

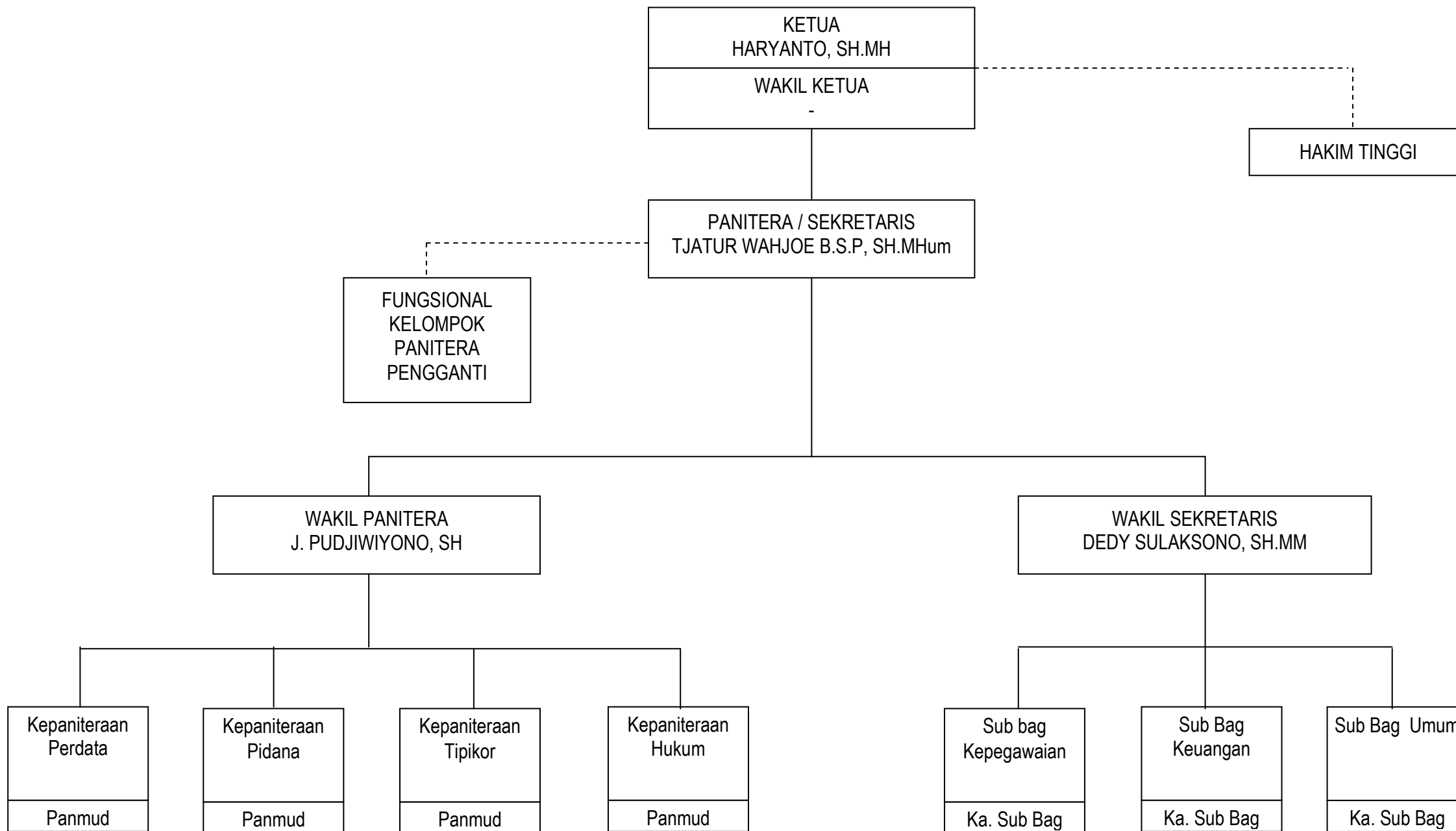
TJATUR WAHJOE B.S.P, S.H., MHum
NIP. 19630517 199103 1 003

BAB V
LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta
3. Rencana Kinerja Tahun 2014
4. Penetapan Kinerja Tahun 2014
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2014
6. Matriks Rencana Strategis Review 2010 – 2014

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

TAHUN 2014





PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415

Email: pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id, Website: www.pt-yogyakarta.go.id

SURAT KEPUTUSAN

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NOMOR :W13.U/483A/SK/III/2014

TENTANG

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2010 – 2014 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2010-2014.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta diberikan tugas untuk :

a. Melakukan *review* atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : Maret 2014

Pengadilan Tinggi Yogyakarta

An. Panitera / Sekretaris

Wakil Sekretaris

DEDY SULAKSONO, SH.MM

NIP. 19631130 198307 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara pidana anak yang diselesaikan dengan sisa perkara anak yang harus diselesaikan	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	Perbandingan perkara perdata yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	Perbandingan perkara pidana yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	Perbandingan perkara pidana anak yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	Perbandingan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		i. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 3 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan dan Tahunan	Bulanan dan Laporan
		j. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 3 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan dan Tahunan	Bulanan dan Laporan
		k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 3 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan dan Tahunan	Bulanan dan Laporan
		l. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 3 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan dan Tahunan	Bulanan dan Laporan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas perkara perdata yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas perkara perdata yang diajukan banding	Kepaniteraan	Laporan dan Tahunan	Bulanan dan Laporan
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas perkara pidana yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas perkara pidana yang diajukan banding	Kepaniteraan	Laporan dan Tahunan	Bulanan dan Laporan

		c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas perkara pidana anak yang diajukan banding	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara perdata yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara pidana yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara pidana anak yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara tindak pidana korupsi yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara perdata, pidana, pidana anak dan tindak pidana korupsi yang ditayangkan di web site dengan jumlah perkara perdata, pidana, pidana anak dan tindak pidana korupsi .	Kepaniteraan/Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah permohonan informasi yang masuk dengan jumlah permohonan informasi yang diselesaikan	Kepaniteraan/Kesekretariatan	Register Permohonan Informasi, Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Perikanan, HAM, dan lain-lain dengan jumlah yang mengikuti diklat	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain dengan jumlah yang mengikuti diklat	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase kelulusan eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding	Perbandingan antara Calon Hakim Tingkat Banding yang lulus eksaminasi dengan Calon Hakim Tingkat Banding yang mengikuti eksaminasi	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah Baperjakat yang diusulkan dengan jumlah Baperjakat yang diselesaikan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	Perbandingan antara pengadaan sarana dan prasarana yang terealisasi dengan yang direncanakan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan dan Laporan Tahunan

		<i>b. Persentase penghapusan Barang Milik Negara yang diselesaikan</i>	<i>Perbandingan antara jumlah penghapusan Barang Milik Negara yang diusulkan dengan jumlah penghapusan Barang Milik Negara yang diselesaikan</i>	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
--	--	---	---	----------------------------	---------------------	-----------------

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %
		h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		i. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		j. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		l. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %

		d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100%
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %
		c. Persentase kelulusan eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding	100 %
		d. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100 %
6.	Peningkatan sarana dan prasana pendukung	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %
		b. Persentase penghapusan Barang Milik Negara yang diselesaikan	100 %

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %
		h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		i. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		j. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		l. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %		
c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %		

		d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %
		c. Persentase kelulusan eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding	100 %
		d. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100 %
6.	Peningkatan sarana dan prasana pendukung	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %
		b. Persentase penghapusan Barang Milik Negara yang diselesaikan	100 %

PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2014
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100%
		c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %	0%
		d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %	0%
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %	87%
		f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %	96%
		g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %	100%
		h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %	95%
		i. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%
		j. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%
		k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%
l. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%		

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %
		c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %
		d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %
		e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
		f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
		g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
		h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %	100 %
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100 %	100 %

4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	0 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %	100 %
		c. Persentase kelulusan eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding	100 %	0 %
		d. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100%	0%
6.	Peningkatan sarana dan prasana pendukung	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %	0 %
		b. Persentase penghapusan Barang Milik Negara yang diselesaikan	100%	100%

MATRIK KINERJA REVIEW RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014.

- Tujuan : 1. Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel.
2. Peningkatan pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%
		c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan	-	-	-	-	100%
		d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%
		f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%
		g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	-	-	-	-	100%
		h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%
		i. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	-	-	-	100%	100%

		j. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	-	-	-	100%	100%
		k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	-	-	-	-	100%
		l. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	-	-	-	100%	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	-	-	-	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	-	-	-	100%	100%
		c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	-	-	-	-	100%
		d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	-	-	-	100%	100%
		e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	-	-	-	100%	100%

		f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	-	-	-	100%	100%
		g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	-	-	-	-	100%
		h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	-	-	-	100%	100%
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	-	-	-	100%	100%
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	-	-	-	100%	100%
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	-	-	-	100%	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	-	-	-	100%	100%

		c. Persentase kelulusan eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding	-	-	-	-	100%
		d. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%
6.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	-	-	-	100%	100%
		b. Persentase penghapusan Barang Milik Negara yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta

Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415

Email : pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id

Website : www.pt-yogyakarta.go.id